

## **TERBENTUKNYA NEGARA MERDEKA ZAIRE (JAJAHAN BELGIA)**

### **A. Latar Belakang**

Kongres Berlin pada tahun 1884-1885 adalah pertemuan penting di antara negara-negara Eropa yang membagi-bagi wilayah Afrika tanpa memperhatikan identitas budaya atau etnis masyarakat setempat. Di antara hasilnya, Raja Leopold II dari Belgia mendapatkan kedaulatan atas Kongo dalam bentuk kepemilikan pribadi (1885-1908), yang dikenal sebagai Kongo Bebas, sebelum akhirnya dialihkan menjadi koloni Belgia. Pemerintahan Belgia di Kongo ditandai dengan eksploitasi brutal sumber daya dan penggunaan tenaga kerja paksa, yang menyebabkan penderitaan besar bagi penduduk setempat.

Perkembangan ini juga terkait dengan perluasan wilayah Belgia di Afrika, termasuk Rwanda dan Burundi, yang menjadi bagian dari jajahan Belgia setelah Perang Dunia I. Kebijakan pemerintahan Belgia di wilayah-wilayah ini seringkali menciptakan ketegangan etnis dan konflik internal, yang kemudian mempengaruhi proses nasionalisme dan pergerakan kemerdekaan di wilayah tersebut.

Dalam konteks ini, Zaire (sekarang Republik Demokratik Kongo) muncul sebagai subjek penting, mengalami perjuangan melawan penjajahan Belgia dan kemudian memperoleh kemerdekaan pada tahun 1960. Pergerakan nasionalis di Zaire dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk penindasan kolonial, eksploitasi sumber daya alam, dan perjuangan untuk otonomi politik dan ekonomi. Studi tentang proses ini dapat memberikan wawasan yang dalam tentang dinamika kolonialisme, nasionalisme, dan perubahan politik di Afrika.

### **B. Terbentuknya Negara Merdeka Zaire**

Negara Zaire yang kini dikenal dengan nama Republik Demokratik Kongo terbentuk setelah memperoleh kemerdekaan dari Belgia pada tahun 1960. Proses pembentukan ini dipengaruhi oleh gerakan nasionalis Kongo yang dipimpin oleh tokoh seperti Patrice Lumumba. Setelah kemerdekaan, negara ini mengalami masa ketegangan politik dan konflik internal, yang berpuncak pada

perebutan kekuasaan antara tokoh lokal dan kekuatan asing. Pada tahun 1971, Presiden Mobutu Sese Seko mengubah nama negara menjadi Zaire, yang bertahan hingga tahun 1997, ketika namanya diubah menjadi Republik Demokratik Kongo (Gerard, 2015).

Warisan kolonialisme Belgia hasil perjanjian Kongres Berlin berperan penting dalam menciptakan kondisi yang mempengaruhi perjuangan kemerdekaan dan pembangunan politik, ekonomi dan sosial pada masa pasca kemerdekaan (Gerard, 2015).

### **C. Leopold Berdaulat di Kongo 1885-1905**

Leopold memperoleh Kongo bukan karena dipilih secara publik oleh seorang perwakilan demokrasi tetapi melalui penipuan dan manipulasi. Pada saat perdagangan budak sedang berlangsung mengkritik dia perlu menggunakan cara lain untuk mencapai koloni Afrika. Dia pertama kali mencari penjelajah untuk melakukannya memetakan wilayah di Afrika Tengah dan menandatangani perjanjian dengan pemimpin setempat. Setelah itu tercapai, dia akan menunjukkan perjanjian tersebut kepada negarawan mana pun untuk lebih melegitimasi posisi dan kendalinya atas negara tersebut. Namun, perjanjian saja tidak cukup dan Leopold menciptakan kemanusiaan organisasi untuk membantu “memadatkan” Kongo padahal sebenarnya mereka diciptakan untuk mendanai eksplorasinya Kongo dan memberinya pengakuan dari negara-negara besar, Dengan orang-orang seperti Stanley dan Henry Shelton Sanford, Leopold mendapatkan pengakuan yang dia butuhkan dan melalui Konferensi Geografis dan Konferensi Berlin dia akhirnya memiliki koloninya (Johnson, 2014).

Ketika Leopold menjajah Negara Bebas Kongo, dia berusaha mengambil sumber daya dengan harga murah. Beberapa sumber daya yang penting adalah gading dan karet, keduanya memiliki nilai yang tinggi permintaan di seluruh dunia. Untuk mengekstraksi sumber daya ini, Leopold membentuk pasukan militer organisasi dan mengizinkan perusahaan konsesi untuk menyebar di sepanjang Negara Bebas Kongo untuk mengatur mendirikan kampekstraksi. Leopold dan perusahaan-perusahaan ini akan menggunakan kerja paksa untuk

memperolehnya sumber daya dan dengan demikian memperoleh keuntungan yang tak terukur (Johnson, 2014).

Tindakan lain yang diambil Leopold untuk mengeksploitasi Kongo adalah melalui pengiriman Para misionaris Katolik, yang tentu saja mendukung perjuangannya karena dia mendanai mereka Para misionaris Katolik ini membentuk sekolah atau koloni untuk mendidik anak-anak Kongo yang bermanfaat bagi Negara. Johannes Fabian, dalam artikelnya “Misi dan Kolonisasi Bahasa Afrika: Perkembangan di Bekas Kongo Belgia,” membahas organisasi dan struktur sekolah. Salah satu aturannya adalah, “Mengajar bahasa nasional Belgia adalah bagian penting dari kurikulum. Hal ini patut diperhatikan karena mengapa sekolah-sekolah ini tidak mengajarkan bahasa nasional yang penting bagi kehidupan sehari-hari dan komunikasi dalam diri mereka? Ewans menjawab hal ini dengan menyatakan, “Ada juga bias yang kuat dalam mendukung persiapan orang Afrika semata-mata menjadi anggota angkatan kerja yang dibutuhkan oleh pertambangan, pertanian dan perusahaan lain.” Tentu saja Leopold merasakan hal itu agar anak-anak ini tumbuh dan bekerja secara efektif dan efisien di koloninya, mereka harus bisa membaca dan berbicara bahasa Belgia. Sekolah-sekolah misi Katolik ini bekerja secara serempak dan di bawah wewenang Leopold. Mereka hanya mengajari anak-anak apa yang berguna bagi Leopold dan pengikutnya perkembangan Kongo. Namun, jika kita menggali lebih dalam beberapa alasan sebenarnya di baliknya sekolah-sekolah Katolik ini mereka dapat menemukan niat eksploitatif Leopold yang sebenarnya. Leopold menulis, “Saya yakin kita harus mendirikan tiga koloni anak. Satu di Kongo atas dekat ekuator, khususnya militer, dengan pendeta untuk pengajaran agama dan kejuruan pendidikan. Satu di Leopoldville di bawah pimpinan pendeta dan seorang tentara untuk pelatihan militer.” (Hochschild, 1998). Demikianlah Leopold ingin tentara masa depan membantu mengawasi tanah air mereka yang ia ambil untuk dieksploitasi mereka lebih jauh lagi. Leopold memberikan subsidi besar pada sekolah-sekolah ini dan selanjutnya meminta sekolah yang lebih besar perekrutan laki-laki yang akan memperkuat rencana tentaranya di masa depan.

Leopold tahu bahwa tidak ada orang waras yang akan secara terbuka menyerahkan sumber daya kepadanya dia menginginkannya dan dia juga tahu bahwa dia tidak ingin membayar untuk sumber daya tersebut. Oleh karena itu, Leopold mendirikan Force Publique pada tahun 1888 sebagai militer permanen di Kongo untuk mengelola ekstraksi sumber daya dan khususnya karet. Mayoritas Force Publique pada awalnya Orang-orang Afrika dari Zanzibar dan Afrika Barat, meskipun untuk menghemat biaya, mereka mulai merekrut langsung dari sana Kongo (Ewans, 2003). Anggota yang direkrut terdiri dari budak atau wajib militer yang telah dibebaskan, semuanya di bawah kepemimpinan pejabat kulit putih Eropa. Ewans mencatat, “Pada tahun 1895, Angkatan Bersenjata berjumlah sekitar 6.000 orang 4.000 di antaranya berasal dari Kongo sendiri, dan pada tahun 1905 jumlah pria di bawah 360 orang kulit putih berjumlah 16.000 orang. Petugas banyak di antaranya orang Skandinavia.” Pertumbuhan Force Publique berhubungan langsung dengan pertumbuhan dan keuntungan yang dihasilkan dari karet. Ini penting karena menyoroti dengan jelas apa yang selama ini menjadi perhatian utama Leopold terhadap Kongo adalah cara untuk memanfaatkan sumber dayanya segala cara yang diperlukan. Dia jelas merupakan tipe orang yang menghalalkan segala cara (Johnson, 2014).

Bayangkan Force Publique bukan sekedar kepolisian, yang dalam banyak situasi melindungi warga negara, dan lebih merupakan organisasi kejam yang bertekad melakukan apa pun terhadap siapa pun mencapai tujuannya. Tujuan mereka adalah memaksa Kongo menyediakan kuota karet dalam jumlah besar setiap minggu. Tindakan mengerikan mereka biasanya mengikuti pola yang sama di setiap desa Gondola menyatakan bahwa “tentara mulai menjarahnya sebagai pembalasan atas penolakan penduduk desa untuk membawa barang. perintah keluar. Para tentara kemudian menyerang penduduk desa dan menangkap perempuan mereka, yang mereka nyatakan sebagai sandera sampai kepala suku dapat membawa sejumlah karet yang dibutuhkan.” (Gondola, 2002). Demikianlah Leopold, melalui Force Publique, sedang membongkar cara hidup masyarakat Kongo dengan menggunakan penculikan sebagai artinya menyuruh laki-laki di tiap desa mengumpulkan karet. Namun, Force Publique

tidak hanya akan terlibat dalam penculikan, tetapi juga para laki-laki pergi, mereka memperkosa perempuan di setiap desa yang mereka datangi. Mereka bahkan menciptakan laki-laki yang memilikinya kembali dengan membawa karet, membeli kembali perempuan-perempuan mereka untuk mendapatkan makanan yang hampir tidak dimiliki penduduk desa sejak mereka kembali tidak diizinkan untuk bercocok tanam. Bagi desa mana pun yang mencoba memberontak, Gondola menambahkan, “Di beberapa desa, pasukan karet memaksa laki-laki di bawah todongan senjata untuk memperkosa ibu dan saudara perempuan mereka sendiri karena mereka menolak menyediakan karet.” Oleh karena itu, hampir tidak ada bantuan apa pun bagi mereka Warga Kongo harus melakukan selain mengikuti perintah Force Publique dan bekerja tanpa henti untuk memperoleh kuota karet mereka. Cara penting lainnya untuk mencapai kuota karet adalah dengan memotong tanaman karet tangan jika suatu desa tidak memenuhi kuotanya. Berat karet yang tidak terpenuhi akan diganti dengan beban tangan kanan yang dipotong sebanyak-banyaknya sesuai kebutuhan sampai beratnya cocok. Hal ini mencerminkan jenis pelanggaran hukum yang terjadi di Kongo (Bruce B, 2007).

Jumlah korban tewas terus meningkat seiring berjalannya waktu dan sebagai dampaknya karet menjadi langka sebagian besar tanaman merambat dipotong dan mati. Betapa buruknya situasi saat ini dan betapa sedikitnya yang dapat dilakukan oleh rakyat Kongo untuk melakukan pembebasan diri. Meskipun periode di bawah kepemimpinan Leopold ini tidak menghentikan sebagian orang Kongo untuk mencoba melakukan hal tersebut melarikan diri dari Kongo, biasanya dengan biaya yang harus dibayar. Hochschild menyatakan, “Saat mereka melarikan diri Dalam ekspedisi tersebut, penduduk desa terkadang menelantarkan anak-anak kecil karena takut tangisan mereka akan terdengar menyingkirkan tempat persembunyian mereka. Akibatnya, banyak anak yang kelaparan.” Tanpa makanan dan energi, keluarga tidak dapat menghidupi diri mereka sendiri dan menjadi semakin lemah, menyebabkan jutaan orang menjadi lebih dapat diterima dan meninggal karena penyakit. Perjalanan panjang laki-laki penduduk desa dan wajib militer penduduk desa ke kapal uap atau ke Force

Publique membuat mereka melakukan perjalanan jarak jauh. Orang Belgia hanya membawa obat untuk diri mereka sendiri, dan terus berlanjut kelelahan fisik, masyarakat Kongo semakin banyak terkena berbagai penyakit. Cacar dan penyakit tidur menyebabkan angka kematian tertinggi, dan diperkirakan setengah juta orang meninggal dari penyakit tidur hanya pada tahun 1901 (Johnson, 2014).

### **1.1 Penyebab Wilayah Belgia Semakin Luas**

Dalam proses Imperialisme Baru ini, negara-negara Eropa memainkan peran penting. Pada masa kemerdekaan pada tahun 1830, proses industrialisasi di Belgia sudah berjalan dengan baik, ditandai dengan perubahan teknologi. Sekitar tahun 1895, penetrasi Belgia ke kekaisaran Tiongkok hampir tidak ada, meskipun ada upaya Raja Leopold II dan Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan hubungan komersial dan meskipun terdapat kehadiran kelompok Cockerill di Tiongkok. Saat itu, Raja Leopold II yang melakukan lobi melalui Kementerian Luar Negeri mendorong Ferdinand Baeyens dan Société Générale untuk berpartisipasi dalam pembangunan jalur kereta api antara Hankow dan Beijing, yang dimulai pada tahun 1898 dan selesai pada tahun 1905. Namun Belgia tidak mendapatkan wilayah di Tiongkok, selain dari zona konsesi beberapa kilometer persegi di Tientsin Tiongkok (1902-1929). Tumbuhnya rasa nasionalisme dalam pemerintahan Tiongkok setelah Pemberontakan Boxer membuat perluasan wilayah lebih lanjut menjadi tidak mungkin. Maka dari itu Belgia melakukan ekspansi ke Kongo. Negara Bebas Kongo menjadi Kongo Belgia pada tahun 1908, ketika negara Belgia mengambil alih “perusahaan” Leopold sebagai reaksi terhadap kritik internasional terhadap sistem konsesi yang didirikan Leopold II sejak tahun 1890 di tempat yang seharusnya menjadi Negara Bebas (Abbeloos, 2008).

### **D. Kasus Rwanda dan Burundi**

Rwanda dan Burundi telah lama dianggap sebagai negara yang hampir sama. Mereka pernah menjadi bagian dari koloni Rwanda-Urundi yang sama, yang pertama kali diperintah oleh Jerman dan kemudian oleh Belgia. Mereka memiliki komposisi etnis dan proporsi demografis yang kurang lebih sama,

yaitu mayoritas Hutu dan minoritas Tutsi dan Twa. Bahasa mereka terkait erat, begitu juga dengan lanskap, praktik pertanian, dan budaya kedua negara. Mereka juga memiliki dua populasi termuda di dunia. Terakhir, kedua negara ini juga pernah mengalami kekerasan ekstrem, termasuk genosida (Sommers, 2011).

Kasus genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan ini telah terjadi di Rwanda sejak 6 April 1994. Kasus ini melibatkan dua suku utama Rwanda: Tutsi dan Hutu. Menurut beberapa sumber, genocide ini menewaskan kurang lebih 800.000 orang. Rwanda adalah negara terpadat di Afrika Tengah dengan populasi 7,4 juta orang. Peristiwa ini dimulai ketika Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana (8 Maret 1937–6 April 1994) menjadi korban penembakan saat berada di dalam pesawat terbang pada tanggal 6 April 1994. Penembakan kejam itu adalah demonstrasi terhadap rencana Presiden Habyarimana untuk Rwanda. Dalam upayanya untuk mewujudkan persatuan etnis di Rwanda, Habyarimana bermaksud membagi kekuatan antara kelompok etnis tersebut. Setahun sebelumnya, rencana itu telah dibuat, seperti yang ditetapkan dalam Piagam Arusha (1993). Untuk diketahui, Habyarimana telah menjabat sebagai presiden Rwanda sejak 1993. Sebelum ini, ia adalah Menteri Pertahanan Rwanda (Wardani, 2023).

Pada tahun 1990-an, Habyarimana mendirikan pemerintahan yang menggabungkan tiga kelompok etnis di Rwanda: Hutu (85 persen), Tutsi (14 persen) dan Twa (1 persen). Agathe Uwilingiyama, yang berasal dari suku Tutsi, diangkat menjadi perdana menteri oleh Habyarimana. Kelompok militan yang ingin mempertahankan pemerintahan satu suku jelas menentang penghapusan suku yang berbeda ini. Ketakutan dan kekecewaan yang berlebihan inilah yang akhirnya mengarah pada pembunuhan presiden sendiri. Akhirnya, Habyarimana dan presiden Burundi dibunuh oleh kelompok militan yang menentangnya saat keduanya berada di dalam pesawat atau helikopter yang diberikan oleh Presiden Perancis Francois Mitterand. Penembakan Presiden Habyarimana yang tragis mengakhiri dua dekade pemerintahannya.

Peristiwa ini memicu pembantaian etnis yang mengerikan di Rwanda. tanpa menunggu sehari-hari. Apalagi minggu setelah kematian Habyarimana, seluruh Rwanda langsung diblokade. Pasukan khusus Garda Presiden dengan bantuan instruktur Perancis segera bertindak (Wardani, 2023).

Pada tanggal 7 April 1994, Angkatan Bersenjata Rwanda (FAR) dan Interahamwe memblokir jalan. Anggotanya dan organisasi Kekuasaan Hutu memulai kampanye pintu ke pintu, dimulai di bagian utara negara dan menyebar ke bagian selatan, dengan tujuan memasukkan orang Hutu moderat dari Rwanda ke bagian selatan. Ribuan orang dibunuh, termasuk Perdana Menteri Agathe Uwilingiyimana. Mereka berkolaborasi dengan kelompok teroris Rwanda, Interahamwe, dan Impuzamugambi. Dimulai dari ibu kota Rwanda, ketiga kelompok bersenjata itu mulai membunuh setiap orang yang mendukung piagam Arusha tanpa peduli statusnya. Pembunuhan kelompok bersenjata tidak dapat dihindari oleh perdana menteri Rwanda yang berasal dari suku Tutsi. Nama-nama menteri, pastor, dan orang-orang yang mendukung dan terlibat dalam perundingan piagam Arusha masih ada di luar dia (Wardani, 2023).

Untuk menghentikan genosida dan menyelamatkan tentara yang terperangkap di Kigali, Front Patriotik Rwanda, dipimpin oleh Paul Kagame, memulai pertahanan besar pada 8 April 1994. Pada tanggal lima belas Pembantaian Nyarubuye terjadi antara April dan 16 April 1994, dan melibatkan pembunuhan antara 5000 dan 10.000 orang di Gereja Katolik Roma Nyarubuye di Provinsi Kibungo, yang sekitar 140 km (60 mil) timur ibu kota Rwanda, Kigali. Korbannya adalah orang Hutu dan Tutsi moderat yang mengungsi ke gereja itu. PBB setuju untuk mengirim 6.800 polisi untuk menjaga warga sipil pada 17 Mei 1994, tetapi itu tidak berhasil karena pembunuhan Tutsi terus berlanjut. Pada 4 Juli 1994, Kigali jatuh ke tangan oposisi RPF. Sekitar 300 mayat masih terlihat di luar di kota Nyarubuye, 100 km timur Kigali. Pemerintah Hutu mengungsi ke pada akhir Juli 1994. RPF menduduki Kigali di Zaire. 31 Pada 8 November 1994, berdasarkan resolusi PBB no. 955, suatu pengadilan kejahatan perang dibentuk untuk kasus genosida Rwanda, yang menewaskan ribuan

pengungsi Hutu di Zaire. Pengadilan ini kemudian dikenal sebagai *International Criminal Tribunal for Rwanda* (Wardani, 2023).

Burundi memiliki dua sejarah tragis tentang genosida dan perang sipil setelah kemerdekaannya pada tahun 1962. Genosida terjadi pertama kali pada tahun 1972 dan kedua kalinya pada tahun 1993. Peristiwa yang menelan korban hingga 250.000 orang ini disebabkan oleh ketidakpercayaan antara elit Hutu dan Tutsi dan sebaliknya. Kebutaan karena sistem pemerintahan yang buruk yang diciptakan oleh elit Tutsi dan pemberontakan yang dimulai oleh oknum Hutu, yang akhirnya mengakibatkan ribuan kematian dari penduduk yang tidak terlibat dalam masalah. Hubungan antara Hutu dan Tutsi semakin buruk setelah pembunuhan perdana menteri Pierre Ngendandumwe. Monopoli Tutsi atas jabatan pemerintahan Burundi membuat pihak-pihak Hutu mempersiapkan penggulingan kursi pemerintahan di kemudian hari. Setelah kematian Ngendandumwe, pemilihan kembali diadakan setelah pemilu pertama di tahun 1962 untuk menggantikan jabatan perdana menteri yang saat itu kosong. Joseph Bamina, ketua partai UPRONA dan kandidat dari etnis Hutu, terpilih. Mwami Burundi saat itu, raja Mwambutsa IV, tidak setuju dengan keputusan terpilihnya perdana menteri yang baru ini. Raja Mwambutsa IV secara sepihak menyerahkan perdana menteri kepada Léopold Biha, sekretaris pribadi Mwami yang juga berasal dari etnis Tutsi. Diangkatnya Biha sebagai perdana menteri memicu pemberontakan yang dipimpin oleh Gervais Nyangoma, seorang anggota militer Hutu. Kudeta yang memaksa Mwami Mwambutsa IV meninggalkan Burundi ke Eropa kemudian digagalkan oleh militer Burundi, dan para pimpinan pemberontakan Hutu dibunuh (Melki, 2019).

Tahata pemimpin negara yang saat itu ditinggalkan oleh Mwambutsa kemudian secara sepihak dialihkan kepada putranya yaitu Charles Ndizeye atau Ntare V pada tanggal 8 Juli 1966. Kepemimpinan Ntare V kemudian dikenal sebagai masa kepemimpinan terpendek dalam sejarah Burundi karena Ntare V terbunuh oleh tentara pemberontak Hutu pada tahun yang sama setelah

kunjungan ke Uganda. Segera setelah kepergian Ntare V, kepemimpinan jatuh ke tangan Michael Micombero, yang juga merupakan keturunan Tutsi pada bulan Desember 1966. Micombero terkenal sebagai diktator di Burundi. adalah aturan yang menekankan darurat militer, adalah aturan yang diberlakukan setelah tentara. Badan ini secara resmi mengambil alih kekuasaan pemerintahan. Rezim Micombero juga dikenal sebagai rezim di mana Tutsi memegang seluruh kekuasaan dan cukup dominan baik di kursi pemerintahan maupun militer Burundi . Orang asal Hutu tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah dan kepada tentara Burundi (Melki, 2019).

Pada tanggal 27 April 1972, sekelompok pemberontak Hutu mengumumkan bahwa mereka telah mendirikan wilayah negara baru yang disebut Republik Martyazo. Pada tanggal 30 April , seluruh angkatan bersenjata dikerahkan oleh Micombero untuk menghancurkan seluruh Hutu. berpartisipasi dalam pemberontakan tahun apa yang telah dilakukan sebelumnya. Genosida ini dilakukan secara sistematis dan menewaskan seluruh orang Hutu, termasuk pelajar, elit politik, dan personel militer. Lebih dari dari 100.000 orang mengungsi ke negara tetangga seperti Tanzania dan Zaire. Peristiwa Genosida pertama di Burundi antara kelompok etnis Tutsi dan Hutu mengakibatkan.210.000 kematian (Melki, 2019).

#### **E. Nasionalisme dan Pergerakan Kemerdekaan**

Nasionalisme di Zaire pada masa itu berkaitan dengan upaya untuk membangun identitas dan kesatuan nasional di antara beragam kelompok etnis dan budaya yang ada di negara tersebut. Hal ini bisa tercermin dalam penggunaan simbol-simbol kebangsaan seperti bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Selain itu, nasionalisme Zaire juga mencakup promosi budaya nasional, bahasa resmi, dan gagasan-gagasan tentang kesatuan dan kedaulatan negara.

Pergerakan kemerdekaan di Zaire terjadi pada tahun 1960. Pada saat itu, negara tersebut memperoleh kemerdekaan dari penjajahan Belgia. Perjuangan untuk kemerdekaan melibatkan berbagai kelompok politik dan pemimpin nasionalis Kongo yang berjuang melawan penjajahan kolonial Belgia. Kongo sendiri

adalah koloni Belgia atau negara jajahan belgia. Ekspedisi Kongo tidak terlepas dari 2 tokoh kunci yaitu Henry Morton Stanley sebagai peneliti. Berdasarkan hasil penelitiannya terhadap situasi di Kongo dapat disajikan dengan keuntungan keseluruhan, H.M. , Stanley juga menemukan dinamit yang sebelumnya tidak diketahui. Hal tersebut yang menyebabkan orang Kongo menyebut Stanley "Boela Matari" atau Penghancur Padas. Orang kedua adalah Raja Belgia , atau Leopold II, dalam hal ini Leopold II berperan dalam mendanai penelitian Stanley di Afrika. Leopold II percaya bahwa Belgia, sebagai negara industri, suatu saat akan mengalami surplus produksi industri dan oleh karena itu perlu mencari pasar baru. Setelah bekerja sama dengan Stanley, Kongo akhirnya ditemukan dan mulai tahun 1908 Kongo resmi menjadi koloni Belgia. Sebagai negara jajahan Belgia, pendidikan di Kongo tentu saja menjadi kendala. Sebuah universitas baru didirikan di Kongo pada tahun 1954. Meski begitu, pelatihan peradilan tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan, tentu saja hal ini sangat mengkhawatirkan. Dalam keadaan seperti ini, nasionalisme di kalangan masyarakat Kongo semakin meningkat mereka menuntut kemerdekaan penuh bagi rakyat Kongo. Banyak pertempuran terjadi di meja perundingan, namun selalu berakhir dengan kegagalan dan akhirnya pada tahun 1960 diadakan KMB (Konferensi Meja Bundar). Pada masa KMB ini, Belgia resmi menyerahkan kemerdekaan penuh kepada Kongo pada tahun dan pada tanggal 30 Juni 1960, Kongo memperoleh kemerdekaan penuh setelah perjuangan terus-menerus (Riyadi, 2016).

## **F. Rangkuman**

Era pemerintahan Leopold di Kongo menandai periode penindasan brutal dan eksploitasi yang mengakibatkan penderitaan besar bagi penduduknya. Tindakan kejam seperti pemaksaan kuota karet dan perbudakan oleh Leopold, didukung oleh kebrutalan militer dari Force Publique, menciptakan penderitaan, kelaparan, dan kematian massal di Kongo. Hal ini menunjukkan warisan kelam kolonialisme Belgia di Kongo. Meskipun awalnya berusaha untuk memperluas pengaruhnya ke Tiongkok, Belgia akhirnya beralih ke Kongo dan berperan dalam eksploitasi kolonial di sana, yang akhirnya menghasilkan kritik

internasional dan perubahan menjadi Kongo Belgia pada tahun 1908. Hal ini mencerminkan peran aktif Belgia dalam praktik kolonialisme pada masa itu, dengan dampak yang beragam di berbagai wilayah.

Rwanda dan Burundi memiliki sejarah yang terkait erat, termasuk masa kolonialisme, komposisi etnis yang serupa, dan pengalaman kekerasan yang tragis, termasuk genosida. Kedua negara ini telah mengalami ketegangan etnis yang serius, perang saudara, dan rezim otoriter yang mengakibatkan ribuan kematian dan pengungsian massal. Sementara itu, nasionalisme di Zaire dipicu oleh upaya untuk membangun identitas dan kesatuan nasional di tengah beragam kelompok etnis dan budaya, dengan perjuangan menuju kemerdekaan dari penjajahan Belgia melibatkan berbagai kelompok politik dan pemimpin nasionalis Kongo. Meskipun menghadapi kendala pendidikan dan pelatihan peradilan di bawah penjajahan Belgia, semangat nasionalisme di kalangan masyarakat Kongo terus tumbuh hingga mencapai kemerdekaan penuh pada tahun 1960 melalui Konferensi Meja Bundar.

### **G. Latihan**

Kerjakan Latihan berikut dan isi jawaban dengan tepat!

1. Bagaimana Terbentuknya negara merdeka Zaire (jajahan Belgia), kongres Berlin?
2. Bagaimana Leopold berdaulat di Kongo 1885 - 1905 serta kebijakan - kebijakan pemerintahan Belgia?
3. Apa yang menyebabkan Wilayah Belgia yang semakin luas?
4. Bagaimana Kasus Rwanda Burundi bisa terjadi?
5. Bagaimana Nasionalisme dan pergerakan kemerdekaan Zaire?

## H. Rujukan

- Abbeloos, Jan-Frederik. 2008. Belgium's Expansionist History between 1870 and 1930: Imperialism and the Globalisation of Belgian Business. MPRA : Munich Personal RePEc Archive. Ghent University.
- Bruce B. Mesquita, "Leopold II dan Selectorate: An Account in Contrast to a Racial Explanation," *Historical Social Research*, 32 (2007) 213
- Gerard, Emmanuel & Kuklick, Bruce. (2015). *Death in the Congo: Murdering Patrice Lumumba*. Harvard University Press
- Gondola, Didier (2002). *Sejarah Kongo*. Westport, Connecticut: Kayu Hijau.
- Hochschild. 1998. *King Leopold's Ghost*, 133.
- Johannes Fabian, "Misi dan Kolonisasi Bahasa Afrika: Perkembangan di Bekas Kongo Belgia," *Jurnal Studi Afrika Kanada*, 17 (1983), 169.
- Johnson, Steven. (2014). *King Leopold II's Exploitation of the Congo From 1885 to 1908 and Its Consequences*. STARS: University of Central Florida
- M Ewans, *European Atrocity, African Catastrophe: Leopold II, the Congo Free State and its Aftermath* (Routledge, 2002).
- Marc Sommers and Peter Uvin. (2011). *Youth in Rwanda and Burundi: Contrasting Visions*
- Melki, Ryan. 2019. KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP INTERVENSI PBB DI BURUNDI. *Lex Et Societatis* Vol. VII
- Riyadi. (2016). *SEJARAH AFRIKA DARI MASA KUNO SAMPAI MODERN*. UNESA PRESS Kelintang Surabaya.
- Wardani, Eka and Rini., Hardiyanto, Lutfi and Hardiyanto., & Utami, Purwani and Puji. (2023). Pelanggaran HAM: Genosida Rwanda 1994. *Journal of Citizenship Values*, 1(1), 31-38.